



## Peran Kepemimpinan Transformasional Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Di Era Society 5.0

Arie Fatrizman<sup>1</sup>, Hendra Karel Wadu<sup>2</sup>, Daniel Elano Meo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Langlang Buana

[^1arie.sdma2025@gmail.com](mailto:arie.sdma2025@gmail.com), [^2waduhendra@gmail.com](mailto:waduhendra@gmail.com), [^3elanosonil@gmail.com](mailto:elanosonil@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kepemimpinan transformasional dalam perspektif tata kelola pemerintahan desa di era Society 5.0, menelaah hubungan antara kepemimpinan transformasional dan penerapan prinsip *good governance*, serta merumuskan implikasi kepemimpinan transformasional terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif, transparan, dan berbasis teknologi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah yaitu buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi *good governance* pada pemerintahan desa di era Society 5.0. Kepemimpinan transformasional mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, transparansi tata kelola pemerintahan, serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis digital. Selain itu, kepemimpinan transformasional juga berkontribusi dalam membangun budaya organisasi pemerintahan desa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan *good governance* pada pemerintahan desa di era Society 5.0 tidak hanya dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan yang visioner, inovatif, dan partisipatif dalam mengelola perubahan organisasi dan pelayanan publik.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan Transformasional, *Good Governance*, Pemerintahan Desa, Society 5.0.

### 1. Pendahuluan

Perkembangan tata kelola pemerintahan pada era digital menuntut pemerintah desa untuk mampu menghadirkan pelayanan publik yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi sosial menuju era Society 5.0 menempatkan teknologi digital sebagai bagian integral dalam proses pemerintahan, termasuk pada level desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Konsep Society 5.0 menekankan integrasi antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan (Fukuyama, 2018). Dalam konteks ini, kepemimpinan transformasional menjadi penting karena mampu mendorong perubahan organisasi melalui visi, inovasi, motivasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam pemerintahan desa. Pemimpin desa dituntut tidak hanya mampu menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat.

Secara yuridis, pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat. Selain itu, prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam tata kelola pemerintahan desa. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *good governance* sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala desa dalam mengelola organisasi pemerintahan desa secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Secara teoritis, kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang mampu menginspirasi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi melebihi kepentingan pribadi melalui pengaruh ideal, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan perhatian individual (Bass & Avolio, 1994). Pemimpin transformasional tidak hanya berfokus pada pencapaian target organisasi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia

dan budaya organisasi yang inovatif. Menurut Robbins dan Judge (2017), kepemimpinan transformasional memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan organisasi yang signifikan melalui peningkatan motivasi dan komitmen anggota organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, gaya kepemimpinan ini relevan diterapkan karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis teknologi di era Society 5.0.

Konsep good governance sendiri merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (UNDP, 1997). World Bank (1992) menjelaskan bahwa good governance merupakan proses pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan secara bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pemerintahan desa, penerapan good governance sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, meminimalkan praktik penyalahgunaan kewenangan, serta memperkuat kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional dipandang sebagai salah satu faktor strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Dalam perspektif administrasi publik, kepemimpinan transformasional dipandang sebagai pendekatan kepemimpinan yang mampu menciptakan perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Thoah (2017), kepemimpinan dalam organisasi publik tidak hanya berfungsi sebagai pengendali administrasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial dan pembangunan masyarakat. Pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk membangun visi bersama, meningkatkan loyalitas aparatur, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang inovatif dalam organisasi pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa sebagai pemimpin publik dituntut mampu mengintegrasikan nilai-nilai pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional menjadi relevan untuk menciptakan birokrasi desa yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, penerapan kepemimpinan transformasional dalam pemerintahan desa juga berkaitan erat dengan upaya penguatan kapasitas aparatur desa. Menurut Sedarmayanti (2018), peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemimpin transformasional mampu memberikan motivasi, pembinaan, dan pengembangan kompetensi kepada aparatur desa agar mampu bekerja secara profesional dan inovatif. Dalam era Society 5.0, aparatur desa dituntut memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, kepala desa sebagai pemimpin transformasional perlu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran, kreativitas, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Secara konseptual, Society 5.0 merupakan era masyarakat yang berpusat pada manusia dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Rahayu dan Day (2021), Society 5.0 menekankan integrasi antara teknologi, inovasi, dan nilai kemanusiaan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan konsep Society 5.0 menuntut adanya transformasi pelayanan publik berbasis digital yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Hal tersebut membutuhkan pemimpin desa yang visioner dan mampu mendorong perubahan organisasi secara berkelanjutan. Kepemimpinan transformasional menjadi penting karena memiliki karakteristik inovatif, adaptif, dan kolaboratif yang sesuai dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan modern di era digital.

Di sisi lain, good governance dalam pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Dwiyanto (2015), good governance dapat terwujud apabila terdapat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Pemerintahan desa yang menerapkan prinsip good governance akan lebih mampu membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, dan menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam hal ini, kepemimpinan transformasional memiliki peran strategis karena mampu membangun komunikasi yang efektif, memperkuat kolaborasi sosial, dan menciptakan budaya organisasi yang transparan. Oleh sebab itu, hubungan antara kepemimpinan transformasional dan good governance menjadi kajian yang penting dalam memahami transformasi tata kelola pemerintahan desa di era Society 5.0.

Secara empiris, beberapa penelitian terkait ini sudah banyak dilakukan. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional kepala desa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian lain oleh Prasetyo dan Nugroho (2022) menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis digital di pemerintahan desa. Selain itu, studi oleh Sari et al.

(2023) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan inovasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi di desa. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung implementasi good governance pada era Society 5.0.

Secara faktual, masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi digital, lemahnya transparansi pengelolaan dana desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi good governance di tingkat desa belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, perkembangan era Society 5.0 menuntut pemerintah desa untuk mampu mengintegrasikan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, keterbatasan kompetensi kepemimpinan dan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam proses transformasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan model kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan organisasi dan adaptasi teknologi secara efektif di lingkungan pemerintahan desa.

Era Society 5.0 juga menghadirkan tantangan baru berupa kebutuhan terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis digital. Pemerintah desa tidak lagi dapat mengandalkan pola birokrasi konvensional, melainkan harus mampu membangun sistem pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif. Menurut Luthra dan Mangla (2018), Society 5.0 menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efektivitas organisasi publik. Dalam situasi ini, kepemimpinan transformasional menjadi faktor penting dalam membangun budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pemimpin desa yang transformasional mampu menciptakan inovasi pelayanan publik berbasis digital sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat secara partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan transformasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan good governance pada pemerintahan desa di era Society 5.0. Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan modern dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan desa di lapangan. Selain itu, penelitian mengenai hubungan kepemimpinan transformasional dan good governance pada konteks pemerintahan desa berbasis Society 5.0 masih relatif terbatas, khususnya pada kajian administrasi publik di Indonesia.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah 1) Mengkaji konsep kepemimpinan transformasional dalam perspektif tata kelola pemerintahan desa di era Society 5.0. 2) Menelaah hubungan antara kepemimpinan transformasional dan penerapan prinsip good governance berdasarkan berbagai literatur ilmiah. 3) Merumuskan implikasi kepemimpinan transformasional terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif, transparan, dan berbasis teknologi digital.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Zed (2014), penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang bersumber dari literatur ilmiah. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep kepemimpinan transformasional dalam mewujudkan *good governance* pada pemerintahan desa di era Society 5.0 berdasarkan berbagai teori, hasil penelitian terdahulu, dan regulasi yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan menitikberatkan pada analisis konseptual dan teoritis dari berbagai sumber ilmiah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, *good governance*, pemerintahan desa, dan Society 5.0. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi yang relevan dan memiliki kredibilitas akademik, baik yang terindeks nasional maupun internasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan yuridis dalam menganalisis tata kelola pemerintahan desa. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kebaruan, dan keterkaitan substansi dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Tahapan pengumpulan data meliputi pencarian sumber pustaka, seleksi literatur berdasarkan relevansi tema, pembacaan kritis, pencatatan data penting, serta pengelompokan informasi sesuai fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2019), studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan dokumen untuk memperoleh informasi yang

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9177>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan kemudian diorganisasikan berdasarkan tema utama, yaitu kepemimpinan transformasional, prinsip *good governance*, pemerintahan desa, dan Society 5.0 sehingga memudahkan proses analisis dan interpretasi data secara sistematis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan memahami, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai informasi yang terdapat dalam literatur ilmiah secara mendalam. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan antara kepemimpinan transformasional dan penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa di era Society 5.0.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya *good governance* pada pemerintahan desa di era Society 5.0. Analisis terhadap berbagai sumber ilmiah menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan desa tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala desa dalam mengelola perubahan organisasi dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, kepemimpinan transformasional dipahami sebagai pendekatan kepemimpinan yang mampu menciptakan perubahan melalui visi, inovasi, motivasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa.

Hasil sintesis berbagai literatur yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, *good governance*, dan Society 5.0 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sintesis Literatur Kepemimpinan Transformasional, *Good Governance*, Dan Society 5.0

Penulis	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
Fukuyama (2018)	Konsep Society 5.0	Konseptual	Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat inovasi berbasis teknologi	Menjadi dasar transformasi tata kelola pemerintahan desa
Bass & Avolio (1994)	Kepemimpinan transformasional	Teoretis	Kepemimpinan transformasional mampu mendorong perubahan organisasi melalui motivasi dan visi	Menjadi landasan teori kepemimpinan desa
Rifai (2022)	Pelayanan publik dan Society 5.0	Kuantitatif deskriptif	Pelayanan publik berbasis digital meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan	Relevan dengan digitalisasi pelayanan desa
Desri & Amelia (2023)	Kepemimpinan transformasional di era Society 5.0	<i>Literature review</i>	Kepemimpinan transformasional dinilai efektif menghadapi perubahan teknologi	Menguatkan pentingnya pemimpin adaptif di desa
Saksono & Manoby (2021)	<i>Good public governance</i> menuju Society 5.0	<i>Literature review</i>	Good governance membutuhkan dukungan teknologi, kolaborasi, dan kebijakan inovatif	Menjelaskan hubungan governance dan Society 5.0
Munawwaroh (2024)	Kepemimpinan transformasional di era Society 5.0	Kajian konseptual	Kepemimpinan transformasional mendorong perubahan organisasi berbasis teknologi	Mendukung transformasi pemerintahan desa digital
Ardinata et al. (2022)	<i>Smart governance</i> dan	Kajian literatur	Kepemimpinan transformasional	Relevan dengan konsep smart village

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9177>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

	kepemimpinan transformasional	mendukung smart governance melalui inovasi dan kolaborasi	
Sedarmayanti (2018)	Reformasi birokrasi dan <i>good governance</i> Teoretis	Tata kelola pemerintahan membutuhkan SDM yang profesional dan adaptif	Relevan dengan penguatan aparatur desa

Berdasarkan Tabel 1, dapat dipahami bahwa sebagian besar literatur menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional dalam menghadapi perubahan tata kelola pemerintahan pada era digital. Literatur-literatur tersebut menunjukkan bahwa pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk membangun budaya organisasi yang inovatif, meningkatkan motivasi aparatur, serta memperkuat kolaborasi dalam organisasi pemerintahan. Selain itu, konsep Society 5.0 dalam berbagai kajian dipandang sebagai era yang menuntut integrasi antara teknologi digital dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintahan desa memerlukan model kepemimpinan yang tidak hanya administratif, tetapi juga visioner dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kepemimpinan transformasional pada pemerintahan desa berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa kepala desa yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional cenderung lebih terbuka terhadap inovasi pelayanan publik dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi desa. Kondisi tersebut terlihat pada penerapan sistem pelayanan administrasi berbasis digital, keterbukaan informasi publik, serta penguatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat melalui media teknologi. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional tidak hanya berfungsi sebagai strategi pengelolaan organisasi, tetapi juga sebagai pendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa.

Selanjutnya, hasil kajian menunjukkan bahwa dimensi kepemimpinan transformasional memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan desa. Adapun dimensi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2.** Dimensi Kepemimpinan Transformasional Dalam Pemerintahan Desa

Dimensi Kepemimpinan Transformasional	Karakteristik	Implementasi pada Pemerintahan Desa
<i>Idealized Influence</i>	Pemimpin menjadi teladan	Kepala desa membangun integritas dan transparansi
<i>Inspirational Motivation</i>	Memberikan motivasi dan visi	Aparatur desa terdorong meningkatkan pelayanan publik
<i>Intellectual Stimulation</i>	Mendorong inovasi	Pengembangan pelayanan administrasi berbasis digital
<i>Individualized Consideration</i>	Perhatian terhadap individu	Penguatan kapasitas SDM aparatur desa

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa setiap dimensi kepemimpinan transformasional memiliki kontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa. Dimensi *idealized influence* berperan dalam membangun integritas dan transparansi pemerintahan desa, sedangkan *inspirational motivation* mendorong aparatur desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, dimensi *intellectual stimulation* berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam menciptakan inovasi pelayanan berbasis digital, dan *individualized consideration* berfungsi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur desa. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan adaptif di era Society 5.0.

Selain itu, hasil kajian literatur juga menunjukkan adanya hubungan konseptual antara kepemimpinan transformasional, prinsip *good governance*, dan Society 5.0 sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3.** Relasi Kepemimpinan Transformasional, *Good Governance*, Dan Society 5.0

<b>Kepemimpinan Transformasional</b>	<b>Prinsip <i>Good Governance</i></b>	<b>Society 5.0</b>
Visioner	Transparansi	<i>Digital governance</i>
Inovatif	Efektivitas	<i>Smart village</i>
Partisipatif	Partisipasi masyarakat	<i>Human-centered technology</i>
Adaptif	Akuntabilitas	Transformasi digital pelayanan publik

Berdasarkan Tabel 3, dapat dipahami bahwa kepemimpinan transformasional memiliki hubungan yang saling mendukung dengan prinsip *good governance* dan konsep Society 5.0. Kepemimpinan yang visioner dan inovatif mampu mendorong terciptanya pemerintahan desa yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi digital. Selain itu, karakter kepemimpinan yang partisipatif dan adaptif juga mendukung peningkatan partisipasi masyarakat serta penguatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *good governance* di era Society 5.0 tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan transformasional dalam mengelola organisasi pemerintahan desa secara kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian literatur, penelitian ini merumuskan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki tiga implikasi utama dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa di era Society 5.0, yaitu penguatan digital governance, peningkatan partisipasi masyarakat berbasis teknologi, dan transformasi budaya birokrasi desa menuju pelayanan publik yang lebih adaptif, transparan, dan inovatif. Kepemimpinan transformasional mendorong aparatur desa untuk lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis pelayanan publik. Dengan demikian, implementasi *good governance* pada pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada regulasi dan teknologi digital, tetapi juga pada kemampuan pemimpin desa dalam membangun budaya organisasi yang visioner, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika era Society 5.0.

### 3.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki hubungan yang kuat dengan keberhasilan penerapan prinsip *good governance* pada pemerintahan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Hartono (2022) yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan efektivitas organisasi publik melalui penguatan budaya kerja yang partisipatif dan inovatif. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa yang menerapkan kepemimpinan transformasional cenderung lebih mampu membangun komunikasi organisasi yang terbuka dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kepemimpinan transformasional juga mendorong aparatur desa untuk lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa memerlukan dukungan kepemimpinan yang visioner dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rahmat dan Sulaiman (2021) yang menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala desa dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Pratiwi et al. (2023) juga menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa melalui pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional dapat dipahami sebagai salah satu faktor strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dalam era Society 5.0, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Temuan ini didukung oleh penelitian Hidayat dan Nurjanah (2022) yang menyatakan bahwa penerapan teknologi digital dalam pemerintahan desa dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat transparansi informasi kepada masyarakat. Penelitian lain oleh Kusuma dan Dewi (2024) menjelaskan bahwa pemimpin desa yang memiliki karakter transformasional lebih mampu mendorong inovasi digital dan pengembangan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi perubahan teknologi. Selain itu, penelitian Fauzi et al. (2023) juga menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan desa dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi *good governance* tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9177>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Temuan ini sesuai dengan penelitian Putra dan Aminah (2021) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian Suryani et al. (2024) juga menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional dapat dipandang sebagai pendekatan kepemimpinan yang relevan dalam mendukung penguatan *good governance* pada pemerintahan desa di era Society 5.0 karena mampu mengintegrasikan aspek teknologi, inovasi, dan nilai-nilai partisipatif dalam tata kelola pemerintahan desa.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan *good governance* pada pemerintahan desa di era Society 5.0. Kepemimpinan transformasional tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan dalam mengelola organisasi pemerintahan desa, tetapi juga sebagai strategi perubahan yang mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, partisipatif, transparan, dan inovatif. Melalui dimensi pengaruh ideal, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan perhatian individual, kepala desa dapat membangun budaya organisasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi transformasi digital. Selain itu, penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa juga dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam membangun komunikasi yang terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa era Society 5.0 menuntut pemerintahan desa untuk mampu mengintegrasikan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan transformasional memiliki implikasi penting terhadap penguatan *digital governance*, peningkatan partisipasi masyarakat berbasis teknologi, serta transformasi budaya birokrasi desa menuju pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan implementasi *good governance* pada pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan kepala desa dalam mengelola perubahan organisasi secara visioner dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan kepemimpinan yang relevan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang modern dan berorientasi pada masyarakat di era Society 5.0.

#### Reference

- Andriani, F., & Hartono, B. (2022). Kepemimpinan transformasional dalam organisasi publik di era digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 101–112.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Sage Publications.
- Fauzi, M., Rahmawati, I., & Nugraha, D. (2023). Digitalisasi pemerintahan desa dan tantangan transformasi pelayanan publik. *Jurnal Governance Indonesia*, 8(1), 55–68.
- Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a new human-centered society. *Japan Spotlight*, 27(5), 47–50.
- Hidayat, T., & Nurjanah, S. (2022). Implementasi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 145–158.
- Kusuma, A., & Dewi, R. (2024). Kepemimpinan transformasional dan inovasi digital pada pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 33–47.
- Luthra, S., & Mangla, S. K. (2018). Evaluating challenges to Industry 4.0 initiatives for supply chain sustainability in emerging economies. *Process Safety and Environmental Protection*, 117, 168–179.
- Pratiwi, N., Setiawan, H., & Ramadhan, F. (2023). Transparansi pelayanan publik melalui kepemimpinan transformasional di pemerintahan desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 88–101.
- Prasetyo, A., & Nugroho, R. (2022). Transformational leadership and digital public service innovation in village governance. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 120–132.
- Putra, R., & Aminah, S. (2021). Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan good governance di pemerintahan desa. *Jurnal Sosial dan Politik*, 7(1), 72–84.
- Rahmat, A., & Sulaiman, M. (2021). Good governance dan kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 5(2), 120–131.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson Education.
- Sari, D., Rahman, A., & Putri, E. (2023). Transformational leadership and accountability in digital village governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 55–68.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- Wahyudi, T. (2021). Kepemimpinan transformasional kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Jurnal Governance*, 6(1), 45–57.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. The World Bank.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Pearson Education.
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance dan good corporate governance*. Mandar Maju.
- Suryani, E., Wahyudi, A., & Kurniawan, R. (2024). Kepemimpinan transformasional dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa digital. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 11(1), 15–29.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

